



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024 BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS	5.	BANTEN RAYA ✓
3.	KABAR BANTEN	6.	

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2024
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
16 APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI BANTEN**

Delapan Kali Berturut-turut, Pemprov Banten Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengucualan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2023. Capaian ini menjadikan Pemprov Banten meraih opini tersebut untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut terhitung sejak LKPD 2016.

"Provinsi Banten berdasarkan hasil audit BPK atas LKPD 2023 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengucualan. Kami bersyukur dan mericikan hasil opini terbaik," ungkap Al Muktabar dalam Rapat Sidang Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi Banten Tahun 2023 di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Cugug, Kota Serang, Jumat (5/4/2024).

Ia menegaskan, opini WTP atas audit LKPD TA 2023 ini merupakan capaian delapan kali secara berturut-turut yang tercipta berkat sinergi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di Pemprov Banten," tambahnya. Menurutnya, raih WTP sebagai bahan introspeksi diri dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. "Apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten atas segala koreksi dan rekomendasi dalam penyajian LKPD. Kami mohon bimbingan dan arahan untuk penyelesaian rekomendasi. Terutama perbaikan-perbaikan administrasi pengelolaan keuangan. Kami berkomitmen untuk melaksanakan koreksi dan rekomendasi," tegas Al Muktabar.

Dalam sambutannya, Anggota V BPK RI Ahmad Nur Supit

memberikan apresiasi kepada Pemprov Banten karena menjadi pemprov paling awal yang menyerahkan LKPD bersama Daerah Istimewa Yogyakarta pada 7 Februari 2024. Menurutnya, hal itu menunjukkan kemandirian sistem dalam pengelolaan sumber daya negara.

Dikatakannya, pemeriksaan atas laporan LKPD merupakan pemeriksaan mandatory yang dilaksanakan oleh BPK setiap tahun. Hal itu sebagai kewajiban untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian juga berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. "Pemeriksaan laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Keempatnya yakni kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepastian terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern," jelas Ahmad Nur Supit.

Dimnya berharap capaian opini WTP menjadi pendorong dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemprov Banten segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi

Banten Dede Sulargo, Pemprov Banten harus segera menindaklanjuti rekomendasi untuk meningkatkan kualitas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023. "Sekaligus untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan," ucapnya.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Sori juga memberikan apresiasi atas capaian delapan kali berturut-turut opini WTP atas LKPD Pemprov Banten. Menurutnya, opini WTP bukan tujuan akhir lantaran yang menjadi tujuan utama adalah kesejahteraan masyarakat Banten.

Menurutnya dengan adanya koordinasi dan sinergi DPRD Provinsi Banten dengan Pemprov Banten pada periode ini telah meraih capaian opini WTP. "DPRD juga diatur oleh Undang-Undang yang sama. Fungsi kita juga unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kami menyusun budgeting bersama-sama. Kami ikut mengawasi. Kami juga objek pemeriksaan, sehingga kami diperiksa juga dan menjadi evaluasi kita," jelasnya. (Adv)

